



BALAI PELAYANAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA
JAWA BARAT

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III 2025



022 - 7336965



jabar.bp2mi.go.id



@bp2mi_jabar



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2025. Penyusunan Laporan Kinerja BP3MI Jawa Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Adapun pedoman penyusunan Laporan Kinerja yang baru berdasarkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Isi dari laporan ini menguraikan seluruh aktivitas secara rinci dan sistematis dengan menggunakan metode Laporan Kinerja yang menggambarkan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi, Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Organisasi, Penjelasan yang memadai atas Pencapaian Kinerja dan Pembandingan Capaian Indikator Kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 tahunan yang direncanakan.

Mudah-mudahan Penyajian Laporan Kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2025 ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama 1 tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Bandung, 15 Oktober 2025
Kepala,


Mulia Nugraha, S.I.K., M.H.
Kombes Pol. NRP. 69110405



DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis BP3MI Jawa Barat Tahun 2025-2029	1
B. Perjanjian Kinerja BP3MI Jawa Barat	2
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Triwulan	4
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	5
C. Realisasi Anggaran	26
BAB III PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT	
A. Permasalahan	29
B. Saran Tindak Lanjut	31



DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel 1.1 Perjanjian Kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2025	2
Tabel 2.1 Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan	4
Tabel 2.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Realisasi Triwulanan	6
Tabel 2.3 Capaian Indikator Kinerja Utama I	7
Tabel 2.4 Rekap Jumlah Pengaduan berdasarkan Status Penanganan	8
Tabel 2.5 Capaian Indikator Kinerja Utama 2	9
Tabel 2.6 Rekap Jumlah Pencatatan Aduan	10
Tabel 2.7 Capaian Indikator Kinerja Utama 3	11
Tabel 2.8 Pelaksanaan MoU antara BP2MI/BP3MI Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah	12
Tabel 2.9 Capaian Indikator Kinerja Utama 4	13
Tabel 2.10 Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Reintegrasi PMI Bermasalah	14
Tabel 2.11 Capaian Indikator Kinerja Utama 5	15
Tabel 2.12 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia	15
Tabel 2.13 Capaian Indikator Kinerja Utama 6	16
Tabel 2.14 Capaian Indikator Kinerja Utama 7	18
Tabel 2.15 Capaian Indikator Kinerja Utama 8	19
Tabel 2.16 Capaian Indikator Kinerja Utama 9	20
Tabel 2.17 Capaian Indikator Kinerja Utama 10	21
Tabel 2.18 Capaian Indikator Kinerja Utama 11	22
Tabel 2.19 Capaian Indikator Kinerja Utama 12	23
Tabel 2.20 Capaian Indikator Kinerja Utama 13	25
Tabel 2.21 Capaian Anggaran dan Kinerja Triwulan III Tahun 2025	26

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2025. BP3MI Jawa Barat pada tahun 2025 memiliki 9 (sembilan) Sasaran Strategis dengan total 13 (tiga belas) Indikator Kinerja, dan 13 (tiga belas) Target Kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 13 (tiga belas) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 1 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 5 target;
- 3) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 7 target; dan
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja BP3MI Jawa Barat tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI KINERJA		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Layanan Penanganan Permasalahan dari Jumlah Pengaduan Masuk yang difasilitasi oleh BP3MI	70%	27,5%	39,29
Mengoptimalkan Sistem Informasi untuk Pelaporan dan Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Pengaduan yang diproses dan dilayani berbasis SISKOP2MI yang difasilitasi oleh BP3MI	100%	69,76%	69,76
Meningkatkan Penguatan Kerjasama dalam Rangka Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Implementasi Kerjasama	75%	75%	100
Mewujudkan optimalisasi pemberdayaan untuk Purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya serta rehabilitasi, reintegrasi, dan pelayanan kepulangan bagi	Jumlah Purna Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan yang difasilitasi Rehabilitasi dan Reintegrasi	40 Orang	40 Orang	100



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI KINERJA		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan	Jumlah Purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarga yang mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial	40 Orang	20 Orang	50
	Jumlah fasilitas pelayanan kepelangan Pekerja Migran Indonesia yang Bermasalah, Sakit, dan Meninggal	112 Orang	38 Orang	33,93
Meningkatkan Layanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Non Pemerintah	Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI, UKPS dan Perseorangan yang mendapatkan layanan penempatan	27.868 Orang	8.522 Orang	30,58
Meningkatkan Pengawasan Jaminan Sosial	Fasilitas Klaim jaminan sosial oleh CPMI dan Pekerja Migran Indonesia yang dilayani oleh BP3MI	100%	100%	100
Meningkatkan Kapasitas Supply	Data supply	2.000 Orang	432 Orang	21,6
	Calon Pekerja Migran Indonesia yang mengikuti verifikasi dokumen penempatan pemerintah	5.000 Orang	0 Orang	0
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Kolaboratif	Pemenuhan syarat pengusulan WBK/WBBM	100%	100%	100
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	75	91,5	122
Membangun Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Kinerja Anggaran	Baik	Baik	100

Kinerja keuangan BP3MI Jawa Barat tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 5.241.361.128,- atau 53,92% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 9.721.224.000,-.

Capaian kinerja BP3MI Jawa Barat diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.



BAB I – PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS BP3MI JAWA BARAT

Rencana Strategis (Renstra) BP3MI Jawa Barat 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh BP3MI Jawa Barat beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra BP3MI Jawa Barat mengacu pada Renstra KP2MI/BP2MI tahun 2025-2029, namun saat ini belum tersusun karena masih dalam masa transisi. Secara ringkas substansi BP3MI dapat diilustrasikan sebagai berikut :

1. Visi

Visi BP3MI Jawa Barat selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang diharapkan memberi arah ke masa depan yaitu: **“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**

2. Misi

Dalam rangka untuk mewujudkan dan mendukung Visi tersebut, BP3MI Jawa Barat menetapkan 4 (empat) misi yang akan dilakukan secara konsisten, yaitu:

- a) Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b) Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- c) Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan
- d) Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana BP2MI.



3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, BP3MI menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu sampai tahun 2025, yaitu:

- a) Terwujudnya perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional guna meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebagai aset bangsa;
- b) Terselenggaranya peningkatan tata kelola organisasi yang efisien, efektif, dan akuntabel.

B. PERJANJIAN KINERJA BP3MI JAWA BARAT

Sebagai penjabaran tujuan yang akan dicapai sampai dengan tahun 2025, BP3MI Jawa Barat telah menetapkan Sasaran Strategis dan IKU yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sementara yang sebelumnya sudah ditandatangani pada bulan Februari 2025 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perjanjian Kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Penanganan Permasalahan PMI	Layanan Penanganan Permasalahan dari Jumlah Pengaduan Masuk yang difasilitasi oleh BP3MI	70%
Mengoptimalkan Sistem Informasi untuk Pelaporan dan Penanganan Permasalahan PMI	Pengaduan yang diproses dan dilayani berbasis SSKO P2MI yang difasilitasi oleh BP3MI	100%
Meningkatkan Penguatan Kerjasama dalam Rangka Penempatan dan Pelindungan PMI	Implementasi Kerjasama	75%
Mewujudkan optimalisasi pemberdayaan untuk Purna PMI dan keluarganya serta rehabilitasi, reintegrasi, dan pelayanan kepulangan bagi PMI yang mengalami permasalahan	Jumlah Purna Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan yang difasilitasi Rehabilitasi dan Reintegrasi	40 Orang
	Jumlah purna pekerja migran Indonesia dan keluarga yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan ekonomi dan sosial	40 Orang
	Jumlah fasilitasi pelayanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah, sakit, dan meninggal	112 Orang



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
Meningkatkan Layanan Penempatan PMI Non Pemerintah	Jumlah PMI yang ditempatkan oleh P3MI, UKPS dan Perseorangan yang mendapatkan layanan penempatan	27.868 Orang
Meningkatkan pengawasan jaminan sosial	Fasilitasi Klaim jaminan sosial oleh CPMI dan PMI yang dilayani oleh BP3MI	100%
Meningkatkan kapasitas supply	Data supply	2.000 Orang
	Calon PMI yang mengikuti verifikasi dokumen penempatan pemerintah	5.000 Orang
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Kolaboratif	Pemenuhan syarat pengusulan WBK/WBBM	100%
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	75
Membangun Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Kinerja Anggaran	Baik

Kegiatan

1. Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
2. Penyelenggaraan Kegiatan Dukungan pada BP3MI

Anggaran

Rp. 6.318.828.000,-
Rp. 5.321.483.000,-



BAB II – AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TRIWULAN

Pengukuran kinerja dilakukan dengan metode sederhana yang membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan dan dapat digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian sasaran kinerja dimaksud.

Laporan Kinerja Triwulan III ini menyajikan pengukuran capaian kinerja BP3MI Jawa Barat selama Triwulan III dan diharapkan dapat menjadi masukan bagi perbaikan kinerja triwulan berikutnya. Secara rinci hasil pengukuran capaian kinerja triwulanan tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Layanan Penanganan Permasalahan dari Jumlah Pengaduan Masuk yang difasilitasi oleh BP3MI	17,5%	25,33%	17,5%	13,33%	17,5%	27,5%	17,5%	-
Mengoptimalkan Sistem Informasi untuk Pelaporan dan Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Pengaduan yang diproses dan dilayani berbasis SISKOP2MI yang difasilitasi oleh BP3MI	100%	75,75%	100%	80,76%	100%	69,76%	100%	-
Meningkatkan Penguatan Kerjasama dalam Rangka Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Implementasi Kerjasama	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	-
Mewujudkan optimalisasi pemberdayaan untuk Purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya serta rehabilitasi, reintegrasi, dan pelayanan	Jumlah Purna Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan yang difasilitasi Rehabilitasi dan Reintegrasi	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	40 Orang	40 Orang	0 Orang	-
	Jumlah Purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarga yang	0 Orang	0 Orang	20 Orang	0 Orang	20 Orang	20 Orang	0 Orang	-



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
keputusan bagi Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan	mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial								
	Jumlah fasilitas pelayanan keputusan Pekerja Migran Indonesia yang Bermasalah, Sakit, dan Meninggal	0 Orang	0 Orang	40 Orang	21 Orang	40 Orang	38 Orang	32 Orang	-
Meningkatkan Layanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Non Pemerintah	Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI, UKPS dan Perseorangan yang mendapatkan layanan penempatan	6.967 Orang	7.110 Orang	6.967 Orang	7.410 Orang	6.967 Orang	8.522 Orang	6.967 Orang	-
Meningkatkan Pengawasan Jaminan Sosial	Fasilitasi Klaim jaminan sosial oleh CPMI dan Pekerja Migran Indonesia yang dilayani oleh BP3MI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
Meningkatkan Kapasitas Supply	Data supply	500 Orang	75 Orang	500 Orang	544 Orang	500 Orang	432 Orang	500 Orang	-
	Calon Pekerja Migran Indonesia yang mengikuti verifikasi dokumen penempatan pemerintah	1.250 Orang	252 Orang	1.250 Orang	6.342 Orang	1.250 Orang	0 Orang	1.250 Orang	-
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Kolaboratif	Pemenuhan syarat pengusulan WBK/WBBM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	75	91,5	75	91,5	75	91,5	75	-
Membangun Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Kinerja Anggaran	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	-

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Kinerja BP3MI Jawa Barat Tahun 2025 diukur dari seluruh pencapaian IKU. Capaian kinerja sampai dengan Triwulan III tahun 2025 sebesar 78,02% yang dihitung dari rata-rata capaian 13 (tiga belas) IKU. Berikut ringkasan capaian kinerja BP3MI Jawa Barat Triwulan III tahun 2025:



Tabel 2.2
Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Realisasi Triwulanan

Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi				Capaian s.d. TW III (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Penanganan Permasalahan PMI	Layanan Penanganan Permasalahan dari Jumlah Pengaduan Masuk yang difasilitasi oleh BP3MI	70%	25,33%	13,33%	27,5%	-	22,05
Mengoptimalkan Sistem Informasi untuk Pelaporan dan Penanganan Permasalahan PMI	Pengaduan yang diproses dan dilayani berbasis SISKOP2MI yang difasilitasi oleh BP3MI	100%	75,75%	80,76%	69,76%	-	75,42
Meningkatkan Penguatan Kerjasama dalam Rangka Penempatan dan Pelindungan PMI	Implementasi Kerjasama	75%	75%	75%	75%	-	100
Mewujudkan optimalisasi pemberdayaan untuk Purna PMI dan keluarganya serta rehabilitasi, reintegrasi, dan pelayanan kepulangan bagi PMI yang mengalami permasalahan	Jumlah Purna Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan yang difasilitasi Rehabilitasi dan Reintegrasi	40 Orang	0 Orang	0 Orang	40 Orang	-	100
	Jumlah Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga yang mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial	40 Orang	0 Orang	0 Orang	20 Orang	-	50
	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia yang Bermasalah, Sakit, dan Meninggal	112 Orang	0 Orang	21 Orang	38 Orang	-	52,68
Meningkatkan Layanan Penempatan PMI Non Pemerintah	Jumlah PMI yang ditempatkan oleh P3MI, UKPS dan Perseorangan yang mendapatkan Layanan Penempatan	27.868 Orang	7.110 Orang	7.410 Orang	8.522 Orang	-	82,68
Meningkatkan pengawasan jaminan sosial	Fasilitasi Klaim Jaminan Sosial oleh CPMI dan PMI yang dilayani oleh BP3MI	100%	100%	100%	100%	-	100
Meningkatkan kapasitas supply	Data supply	2.000 Orang	75 Orang	544 Orang	432 Orang	-	52,55
	Calon PMI yang mengikuti Verifikasi Dokumen Penempatan Pemerintah	5.000 Orang	252 Orang	6.342 Orang	0 Orang	-	131,88



Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi				Capaian s.d. TW III (%)
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Kolaboratif	Pemenuhan Syarat Pengusulan WBK/WBBM	100%	100%	100%	100%	-	100
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	75	91,5	91,5	91,5	-	122
Membangun Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Kinerja Anggaran	Baik	Baik	Baik	Baik	-	100

Hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja BP3MI Jawa Barat Triwulan III Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1

“MENINGKATKAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENANGANAN PERMASALAHAN PMI”

IKU 1 – Layanan Penanganan Permasalahan dari Jumlah Pengaduan Masuk yang difasilitasi oleh BP3MI

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama 1

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Triwulan III	Capaian
Layanan Penanganan Permasalahan dari Jumlah Pengaduan Masuk yang difasilitasi oleh BP3MI	70%	27,5%	39,29%

a. Informasi Kinerja

Layanan Penanganan Permasalahan disini yang dimaksud adalah layanan pengaduan kasus yang diterima langsung oleh BP3MI Jawa Barat. Menurunnya permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia / Pekerja Migran Indonesia terjadi dikarenakan BP3MI Jawa Barat selalu berupaya menindaklanjuti permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia / Pekerja Migran Indonesia dengan memanggil para pihak terkait untuk di mediasi dalam rangka pemenuhan hak PMI. Penanganan permasalahan dilaksanakan dengan cara diantaranya:

- 1) Penerimaan dan pengidentifikasian pengaduan;
- 2) Pencatatan pengaduan dan penganalisisan pengaduan;
- 3) Konsultasi;



- 4) Klarifikasi; dan
- 5) Mediasi (dalam hal tidak dapat selesai di tahap klarifikasi).

b. Evaluasi Kinerja

Tabel 2.4
Rekap Jumlah Pengaduan berdasarkan Status Penanganan

No	Status Penanganan Aduan	Triwulan III
1	Dalam Proses	81
2	Pelimpahan Internal	5
3	Pelimpahan Eksternal, Selesai	14
4	Selesai	64

Jumlah pengaduan yang diterima oleh Tim Pelayanan Aduan Mediasi dan Advokasi Pekerja Migran Indonesia pada Pengguna Jasa Perseorangan dan Berbadan Hukum di lingkungan BP3MI Jawa Barat untuk periode Triwulan III Tahun 2025 berjumlah 164 kasus. Terdiri dari 121 kasus berupa surat masuk dan 43 kasus berupa pengaduan langsung (tatap muka & Helpdesk). Seluruh aduan yang masuk telah ditindaklanjuti melalui proses pendalaman kronologi, klarifikasi, mediasi, persuratan ke direktorat teknis Kementerian P2MI, monitoring tindak lanjut surat dari KP2MI kepada Perwakilan RI di negara penempatan, sampai dengan penutupan kasusnya. Kasus Pekerja Migran Indonesia terdapat penurunan sebesar 3,92% dari triwulan yang sama di tahun lalu, mengingat saat ini BP3MI Jawa Barat telah memiliki layanan aduan online melalui kontak Helpdesk Crisis Center BP3MI Jawa Barat yang dapat diakses dengan mudah kapanpun dan dimanapun dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya. Pada tahun 2025, target fisik penanganan aduan masuk yang difasilitasi oleh BP3MI Jawa Barat ialah sebanyak 600 aduan, dengan target per triwulan sebanyak 150 aduan.

c. Faktor pendorong, penghambat, dan strategi penyelesaian masalah

i. Faktor Pendorong/Penghambat

Trend permasalahan yang sering ditemukan ialah terkait Pekerja Migran Indonesia yang baru diberangkatkan beberapa hari ke negara penempatan secara nonprosedural khususnya wilayah Asia dan Timur Tengah, namun setelah mengetahui bahwa prosesnya ilegal, Pekerja Migran Indonesia



menyampaikan permohonan bantuan agar dapat segera dipulangkan ke Indonesia. Akan menjadi kendala apabila di negara penempatan dirinya telah menandatangani dokumen perjanjian kerja dan terikat hukum yang berlaku di negara penempatan (masuk secara ilegal, tidak memiliki identitas dan izin kerja, menjadi tanggungjawab kafil/pengguna jasanya).

ii. Strategi Penyelesaian Masalah

Memberikan pendampingan bagi keluarga untuk melaporkan pihak-pihak yang secara tidak bertanggungjawab menempatkan Pekerja Migran Indonesia kepada Kepolisian setempat sebagai upaya penegakkan hukum atas pelanggaran Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

SASARAN STRATEGIS 2

“MENGOPTIMALKAN SISTEM INFORMASI UNTUK PELAPORAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN PMI”

IKU 2 – Pengaduan yang diproses dan dilayani berbasis SSKO P2MI yang difasilitasi oleh BP3MI

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Utama 2

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Triwulan III	Capaian
Pengaduan yang diproses dan dilayani berbasis SSKO P2MI yang difasilitasi oleh BP3MI	100%	69,76%	69,76%

a. Informasi Kinerja

Persentase pengaduan dari CPMI PMI, keluarganya, perwakilan Republik Indonesia/KDEI, kementerian/lembaga terkait, dan/atau masyarakat diproses dan dilayani oleh BP3MI berbasis sistem informasi. Pengaduan yang diproses dan dilayani berbasis SSKO P2MI yang difasilitasi oleh BP3MI diukur melalui jumlah pengaduan yang masuk sampai dengan tahap verifikasi untuk kemudian dilakukan pelimpahan ke KP2MI/BP2MI melalui Direktorat Jenderal Pelindungan.

**b. Evaluasi Kinerja**

Tabel 2.6
Rekap Jumlah Pencatatan Aduan

No	Aduan	Triwulan III
1	Langsung/Helpdesk	43
2	Terinput	30
Capaian		69,76%

Berdasarkan realisasi Triwulan III pada tahun 2025 sudah terekam dalam sistem Crisis Center sebanyak 30 aduan dari total 43 aduan, dengan capaian sebesar 69,76% dari target 100%, yang mana didominasi aduan yang masuk ke BP3MI Jawa Barat melalui channel Helpdesk Crisis Center BP3MI Jawa Barat. Selain itu aduan juga masuk melalui layanan tatap muka, serta surat dari stakeholder terkait seperti pemerintah daerah, Perwakilan RI, kementerian/lembaga terkait, serta masyarakat. Aduan yang belum terdata dalam system Crisis Center KP2MI disebabkan oleh kurangnya kelengkapan kronologi dan dokumen aduan dari saat awal pengadu menyampaikan permohonan, serta tidak dapat terhubungnya kontak pengadu maupun Pekerja Migran Indonesia yang terkendala sehingga belum memenuhi kriteria aduan yang dapat diinput ke dalam system. Pada tahun 2025, target fisik penanganan aduan yang diproses dan dilayani berbasis SISKOP2MI yang difasilitasi oleh BP3MI Jawa Barat ialah sebanyak 120 aduan, dengan target per triwulan sebanyak 30 aduan.

c. Faktor pendorong, penghambat, dan strategi penyelesaian masalah**i. Faktor Pendorong/Penghambat**

- Ketidaklengkapan kronologi aduan dan dokumen identitas Pekerja Migran Indonesia, pengadu, serta pihak-pihak yang diadukan, sehingga petugas membutuhkan waktu lebih lama untuk melengkapi data yang dipersyaratkan.
- Tidak tersedianya kontak pengadu maupun Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan, sehingga petugas kesulitan meminta informasi kelengkapan kronologi dan tuntutan.



ii. Strategi Penyelesaian Masalah

- Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Penerimaan Pengaduan Tatap Muka dengan memberikan batasan waktu selama 30 hari kepada pengadu untuk melengkapi data yang dipersyaratkan.
- Melibatkan pemerintah daerah untuk mengkomunikasikan kebutuhan informasi dan data dari pengadu maupun keluarga Pekerja Migran Indonesia.

SASARAN STRATEGIS 3

“MENINGKATKAN PENGUATAN KERJASAMA DALAM RANGKA PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PMI”

IKU 3 – Implementasi Kerjasama

Tabel 2.7
Capaian Indikator Kinerja Utama 3

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Triwulan III	Capaian
Implementasi Kerjasama	75%	75%	100%

a. Informasi Kinerja

Dokumen kerja sama yang terimplementasi adalah dokumen kerja sama yang substansi ruang lingkupnya telah dilaksanakan di wilayah kerja BP3MI Jawa Barat. Sedangkan Implementasi Kerjasama Instansi Pemerintah adalah pelaksanaan perjanjian atau kesepakatan yang telah disepakati antara dua atau lebih Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan Bersama, terutama untuk meningkatkan Pelayanan Publik, Pembangunan, atau berbagai bidang lainnya dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Perjanjian Kerjasama antar Pemerintah setempat.

b. Evaluasi Kinerja

BP2MI / BP3MI Jawa Barat menargetkan 28 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat untuk dilaksanakan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Pemerintah setempat terkait Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dari mulai tahun 2021 sampai akhir tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak 21 penandatanganan MoU dengan Pemerintah Daerah



di wilayah Provinsi Jawa Barat. Target fisik indikator Implementasi Kerjasama sebanyak 28 wilayah, sedangkan target tahun 2025 sebesar 75% atau sebanyak 21 wilayah. Untuk realisasi Tahun 2025 diambil dari rekapitulasi pelaksanaan MoU dari tahun 2021 (tahun awal pelaksanaan MoU) sampai tahun berjalan yaitu sebesar 21 wilayah atau 75% dari target 28 wilayah. Adapun Pemerintah Daerah yang belum melaksanakan MoU sebanyak 7 wilayah, diantaranya 6 wilayah masih dalam tahap perencanaan dan menunggu kebijakan dari pusat, sedangkan 1 wilayah sudah menyatakan tidak akan melaksanakan MoU dengan BP2MI/BP3MI terkait Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berikut rincian pelaksanaan MoU antara BP2MI/BP3MI Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah wilayah Provinsi Jawa Barat:

Tabel 2.8
Pelaksanaan MoU antara BP2MI/BP3MI Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah

NO	PEMERINTAH KAB./KOTA	TMT	JANGKA WAKTU	TMT BERAKHIR	STATUS
1	Kabupaten Bandung	17-06-2021	3 Tahun	17-06-2024	Habis
2	Kota Banjar	22-12-2022	2 Tahun	22-12-2024	Habis
3	Kabupaten Cirebon	22-12-2022	2 Tahun	22-12-2024	Habis
4	Kabupaten Indramayu	22-12-2022	3 Tahun	22-12-2025	Berlaku
5	Kabupaten Cianjur	22-12-2022	3 Tahun	22-12-2025	Berlaku
6	Kabupaten Subang	22-12-2022	3 Tahun	22-12-2025	Berlaku
7	Kabupaten Ciamis	22-12-2022	3 Tahun	22-12-2025	Berlaku
8	Kabupaten Bandung Barat	22-12-2022	3 Tahun	22-12-2025	Berlaku
9	Kota Tasikmalaya	22-12-2022	3 Tahun	22-12-2025	Berlaku
10	Provinsi Jawa Barat	29-03-2023	4 Tahun	29-03-2027	Berlaku
11	Kabupaten Karawang	13-04-2023	5 Tahun	13-04-2027	Berlaku
12	Kabupaten Sukabumi	17-10-2023	3 Tahun	17-10-2026	Berlaku
13	Kabupaten Garut	21-11-2023	1 Tahun	21-11-2024	Habis
14	Kabupaten Bogor	22-05-2024	3 Tahun	22-05-2027	Berlaku
15	Kabupaten Sumedang	24-07-2024	3 Tahun	24-07-2027	Berlaku
16	Kabupaten Bekasi	24-07-2024	3 Tahun	24-07-2027	Berlaku
17	Kabupaten Kuningan	24-07-2024	3 Tahun	24-07-2027	Berlaku
18	Kabupaten Majalengka	24-07-2024	3 Tahun	24-07-2027	Berlaku
19	Kabupaten Purwakarta	24-07-2024	3 Tahun	24-07-2027	Berlaku
20	Kota Sukabumi	24-07-2024	3 Tahun	24-07-2027	Berlaku
21	Kota Cimahi	24-07-2024	3 Tahun	24-07-2027	Berlaku



SASARAN STRATEGIS 4

“MEWUJUDKAN OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN UNTUK PURNA PMI DAN KELUARGANYA SERTA REHABILITASI, REINTEGRASI, DAN PELAYANAN KEPULANGAN BAGI PMI YANG MENGALAMI PERMASALAHAN”

IKU 4 – Jumlah Purna Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan yang difasilitasi Rehabilitasi dan Reintegrasi

Tabel 2.9
Capaian Indikator Kinerja Utama 4

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Triwulan III	Capaian
Jumlah Purna Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan yang difasilitasi Rehabilitasi dan Reintegrasi	40 Orang	40 Orang	100%

a. Informasi Kinerja

Jumlah individu Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah yang menerima layanan rehabilitasi dan reintegrasi setelah mereka kembali dari bekerja di luar negeri.

Fasilitasi rehabilitasi dalam hal ini antara lain perawatan lanjutan yang dilakukan di dalam negeri bagi PMI yang sakit, baik pemulihan fisik maupun pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian kberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam Masyarakat.

Reintegrasi sosial adalah penyatuan kembali PMI yang bermasalah kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.

b. Evaluasi Kinerja

Jumlah target peserta kegiatan Rehabilitasi dan Reintegrasi Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya yang tercantum dalam Renstra BP3MI Jawa Barat tahun 2025 adalah masing-masing 20 orang per kegiatan. Pada periode Triwulan III Tahun 2025, terdapat sebanyak 20 Purna Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan yang difasilitasi Rehabilitasi dan 20 Purna Pekerja Migran Indonesia yang difasilitasi Reintegrasi yang diselenggarakan oleh BP3MI Jawa Barat, berikut rincian kegiatannya :



Tabel 2.10
Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Reintegrasi PMI Bermasalah

NO	WAKTU	LOKASI	JUMLAH PMI	NEGARA PENEMPATAN	DAERAH ASAL PMI	MITRA PELATIHAN
1	27 - 29 Agustus 2025	Gardena Hotel Indramayu	20	- Timur Tengah - Suriah - Singapura - Bosnia - Malaysia - Hongkong - UEA - Taiwan - Arab Saudi	Kab. Indramayu	- Pemkab Indramayu - Dinas Tenaga Kerja - Dinas Sosial - Dinas Kesehatan - BPJS Kesehatan Indramayu - Klinik Utama Medissina
2	22 – 23 September 2025	Hotel Gino Ferucci Cianjur	20	- Turki - Korea Selatan - Polandia	Kab. Ciajur	- Pemkab Cianjur - Disnakertrans Kab. Cianjur - Balai Latihan Kerja - Polres Cianjur

c. Faktor pendorong, penghambat, dan strategi penyelesaian masalah

i. Faktor Pendorong/Penghambat

- Terjadi Efisiensi Anggaran sebagai imbas Instruksi Presiden melalui Surat Kementerian keuangan No. S-37/MK.02/2025 yang menyebabkan beberapa kegiatan mengalami blokir dan realokasi anggaran.
- Belum diterbitkannya aturan turunan dari Perubahan Nomenklatur BP2MI menjadi Kementerian P2MI/BP2MI terutama aturan di pada kegiatan rehabilitasi dan reintegrasi bagi PMI yang mengalami permasalahan dan juga belum tersedianya Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan reintegrasi bagi PMI yang mengalami permasalahan.

ii. Strategi Penyelesaian Masalah

- BP3MI Jawa Barat berkoordinasi dengan Kementerian P2MI/BP2MI melalui Direktorat Jendral Pemberdayaan dan Direktorat Reintegrasi dan penguatan Keluarga petunjuk teknis untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan reintegrasi bagi PMI yang mengalami permasalahan.
- BP3MI Jawa Barat telah bersurat kepada beberapa daerah dengan permasalahan Pekerja Migran Indonesia terbanyak untuk dapat mengusulkan data calon peserta kegiatan rehabilitasi dan reintegrasi yang rencananya akan dilaksanakan pada Triwulan III tahun 2025.



IKU 5 – Jumlah Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga yang mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial

Tabel 2.11
Capaian Indikator Kinerja Utama 5

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Triwulan III	Capaian
Jumlah Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga yang mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial	40 Orang	20 Orang	50%

a. Informasi Kinerja

Fasilitas pemberdayaan bagi purna PMI merupakan pemberian pemberdayaan ekonomi dan sosial yang terintegrasi setelah penempatan (edukasi keuangan, kewirausahaan, edukasi akses ke lembaga keuangan, *parenting*).

b. Evaluasi Kinerja

Jumlah target Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dan keluarganya yang tercantum dalam Renstra BP3MI Jawa Barat tahun 2025 adalah 40 orang dengan jenis pemberdayaan ekonomi (20 peserta) dan sosial (20 peserta). Untuk tahun 2025 kegiatan ini dilaksanakan dengan adanya perubahan skema pelatihan kewirausahaan dan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tersebut dibatasi. Pada Triwulan III, terdapat pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh BP3MI Jawa Barat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.12
Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia

NO	WAKTU	LOKASI	JUMLAH PMI	NEGARA PENEMPATAN	DAERAH ASAL PMI	JENIS PELATIHAN	MITRA PELATIHAN
1	15 - 18 Juli 2025	Grand Cordela Hotel AS Putra Kabupaten Kuningan	20	- Taiwan - Abu Dhabi - Dubai - Arab Saudi - Irak - Qatar - Korea Selatan - Malaysia	Kab. Kuningan	Sektor Pariwisata Kuliner: Pembuatan Brownies dan Puff Pastry	Ibu Nindi Apridha Jamil Praktisi Kuliner Tata Boga



c. Faktor pendorong, penghambat, dan strategi penyelesaian masalah

i. Faktor Pendorong/Penghambat

- Terjadi Efisiensi Anggaran sebagai imbas Instruksi Presiden melalui Surat Kementerian keuangan No. S-37/MK.02/2025 yang menyebabkan beberapa kegiatan mengalami blokir dan realokasi anggaran.
- Belum diterbitkannya aturan turunan dari Perubahan Nomenklatur BP2MI menjadi Kementerian P2MI/BP2MI terutama aturan di pada kegiatan rehabilitasi dan reintegrasi bagi PMI yang mengalami permasalahan dan juga belum tersedianya Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan pemberdayaan bagi PMI yang mengalami permasalahan.

ii. Strategi Penyelesaian Masalah

- BP3MI Jawa Barat berkoordinasi dengan Kementerian P2MI/BP2MI melalui Direktorat Jendral Pemberdayaan dan Direktorat Reintegrasi dan penguatan Keluarga petunjuk teknis untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan bagi PMI Purna dan keluarganya.
- BP3MI Jawa Barat telah meninjau usulan peserta pelatihan yang diterima dari Disnaker Kabupaten Kuningan serta melakukan verifikasi data calon peserta dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pelatihan yang akan terlaksana pada periode Triwulan III tahun 2025.

IKU 6 – Jumlah Fasilitas Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia yang Bermasalah, Sakit, dan Meninggal

Tabel 2.13
Capaian Indikator Kinerja Utama 6

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Triwulan III	Capaian
Jumlah Fasilitas Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia yang Bermasalah, Sakit, dan Meninggal	112 Orang	38 Orang	33,93%

a. Informasi Kinerja

Dalam hal ini yang dimaksud dengan fasilitas pemulangan PMI adalah kegiatan fasilitas pemulangan CPMI/PMI/Keluarganya yang mengalami permasalahan atau musibah yang terjadi sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja di luar negeri.



b. Evaluasi Kinerja

Jumlah target Fasilitas Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia yang Bermasalah, Sakit, dan Meninggal yang tercantum dalam Renstra BP3MI Jawa Barat tahun 2025 adalah sebanyak 112 orang. Pada periode Triwulan III Tahun 2025, terdapat fasilitas layanan kepulangan (transport PMI terkendala) sebanyak 1 orang. penyerahan bantuan PMI sakit sebanyak 13 orang dan bantuan PMI meninggal sebanyak 24 orang yang diselenggarakan oleh BP3MI Jawa Barat.

c. Faktor pendorong, penghambat, dan strategi penyelesaian masalah

i. Faktor Pendorong/Penghambat

- Tingginya angka kepulangan Pekerja Migran Indonesia deportasi, Calon Pekerja Migran Indonesia hasil pengamanan keberangkatan nonprosedural asal Jawa Barat, namun dengan diberlakukannya Efisiensi Anggaran sebagai imbas Instruksi Presiden melalui Surat Kementerian keuangan No. S-37/MK.02/2025 yang menyebabkan beberapa kegiatan mengalami blokir dan realokasi anggaran, layanan yang dapat difasilitasi ialah pendampingan kepulangan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal, sementara bagi yang terkendala akan diupayakan pemulangan secara mandiri, dijemput pihak keluarga, maupun difasilitasi oleh pemerintah daerah.

ii. Strategi Penyelesaian Masalah

- BP3MI Jawa Barat berkoordinasi dengan Kementerian P2MI/BP2MI melalui Direktorat Jendral Pemberdayaan dan Direktorat Pemulangan dan Rehabilitasi, serta pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan fasilitas pemulangan PMI yang mengalami permasalahan.



SASARAN STRATEGIS 5

“MENINGKATKAN LAYANAN PENEMPATAN PMI NON PEMERINTAH”

IKU 7 – Jumlah PMI yang ditempatkan oleh P3MI, UKPS dan Perseorangan yang mendapatkan Layanan Penempatan

Tabel 2.14
Capaian Indikator Kinerja Utama 7

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Triwulan III	Capaian
Jumlah PMI yang ditempatkan oleh P3MI, UKPS, dan Perseorangan yang mendapatkan Layanan Penempatan	27.868 Orang	8.522 Orang	30,58%

a. Informasi Kinerja

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

BP3MI Jawa Barat terus mendorong dan mengupayakan peningkatan penempatan pekerja migran Indonesia yang terampil dan profesional dengan melayani proses penyiapan penempatan pekerja migran Indonesia baik melalui skema G to G, G to P, P to P, maupun mandiri. Pelayanan penempatan meliputi verifikasi dokumen calon pekerja migran Indonesia dengan menunjukkan dokumen persyaratan lengkap yaitu identitas diri calon pekerja migran, dokumen penempatan, serta sertifikat keterampilan sesuai jabatan yang diminati pekerja migran selanjutnya pelaksanaan orientasi pra pemberangkatan. Indikator kinerja berdasarkan realisasi jumlah pekerja migran Indonesia yang terampil dan profesional pada jabatan di sektor pekerjaan berbadan hukum ataupun sektor formal.

b. Evaluasi Kinerja

Tahun 2023 terdapat peralihan sistem penempatan pekerja migran Indonesia dari SISKOTKLN ke SIAPKerja yang selanjutnya terintegrasi dengan SISKOP2MI. Adanya perubahan sistem tersebut membutuhkan penyesuaian khususnya pada skema penempatan P to P. Selain itu, di beberapa jabatan dalam SIP2MI telah habis masa berlakunya dan kurang tersedianya peminat calon pekerja migran Indonesia terhadap jabatan tersebut. Untuk mengatasi



kendala tersebut, BP3MI Jawa barat melaksanakan kegiatan sosialisasi peluang kerja ke luar negeri dan migrasi aman di wilayah Jawa Barat.

Tahun 2024 sampai tahun 2025 terjadi peningkatan proses pelayanan penyiapan pekerja migran di Jawa Barat dari skema pemerintah, swasta, maupun perseorangan Jumlah target fisik penempatan PMI terampil dan profesional tahun anggaran 2025 adalah 27.868 CPMI/PMI dan realisasi pada Triwulan III sebesar 8.522 CPMI/PMI atau 30,58%.

SASARAN STRATEGIS 6

“MENINGKATKAN PENGAWASAN JAMINAN SOSIAL”

IKU 8 – Fasilitasi Klaim Jaminan Sosial oleh CPMI dan PMI yang dilayani oleh BP3MI

Tabel 2.15
Capaian Indikator Kinerja Utama 8

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Triwulan III	Capaian
Fasilitasi Klaim Jaminan Sosial oleh CPMI dan PMI yang dilayani oleh BP3MI	100%	100%	100%

a. Informasi Kinerja

- 1) Presentase antara permintaan fasilitasi claim jaminan sosial ketenagakerjaan oleh CPMI dan PMI dengan layanan fasilitasi klaim yang diberikan;
- 2) Definisi dari Kolom PLPB: Presentase antara permintaan fasilitasi klaim jaminan sosial ketenagakerjaan atau asuransi oleh CPMI, PMI dan ahli waris dengan layanan fasilitasi claim yang diberikan;
- 3) Layanan fasilitasi merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan oleh BP3MI dalam rangka proses klaim jaminan sosial ketenagakerjaan dan atau asuransi.

b. Evaluasi Kinerja

Jumlah target Fasilitasi Klaim Jaminan Sosial oleh CPMI dan PMI yang dilayani yang tercantum dalam Renstra BP3MI Jawa Barat tahun 2025 adalah sebesar 100%. Pada periode Triwulan III Tahun 2025, terdapat sebanyak 23 permohonan fasilitasi klaim jaminan sosial dan seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan bersurat kepada Kantor Wilayah Jawa Barat maupun Kantor Cabang



Kab/Kota BPJS Ketenagakerjaan, serta dimonitor progres dan pemenuhan klaimnya.

c. Faktor pendorong, penghambat, dan strategi penyelesaian masalah

i. Faktor Pendorong/Penghambat

- Tingginya angka kepulangan Pekerja Migran Indonesia deportasi, Calon Pekerja Migran Indonesia hasil pengamanan keberangkatan nonprosedural asal Jawa Barat, namun dengan diberlakukannya Efisiensi Anggaran sebagai imbas Instruksi Presiden melalui Surat Kementerian keuangan No. S-37/MK.02/2025 yang menyebabkan beberapa kegiatan mengalami blokir dan realokasi anggaran, layanan yang dapat difasilitasi ialah pendampingan kepulangan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal, sementara bagi yang terkendala akan diupayakan pemulangan secara mandiri, dijemput pihak keluarga, maupun difasilitasi oleh pemerintah daerah.

ii. Strategi Penyelesaian Masalah

- BP3MI Jawa Barat berkoordinasi dengan Kementerian P2MI/BP2MI melalui Direktorat Jendral Pemberdayaan dan Direktorat Pemulangan dan Rehabilitasi, serta pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemulangan PMI yang mengalami permasalahan.

SASARAN STRATEGIS 7

“MENINGKATKAN KAPASITAS SUPPLY”

IKU 9 – Data Supply

Tabel 2.16
Capaian Indikator Kinerja Utama 9

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Triwulan III	Capaian
Data Supply	2.000 Orang	432 Orang	21,6%

a. Informasi Kinerja

- 1) Supply adalah ketersediaan orang/kandidat yang berpotensi untuk memenuhi peluang kerja luar negeri;



- 2) Potensi Supply adalah gambaran supply di wilayah kerja BP3MI yang disusun berdasarkan identitas diri, kontak, sektor jabatan, pendidikan, kompetensi, pengalaman kerja, dll;
- 3) Jenis Data potensi supply didasarkan pada sektor pekerjaan antara lain, kesehatan (keperawatan), pertanian, hospitality, manufaktur, perkebunan, konstruksi, dll;
- 4) Kapasitas supply adalah upaya peningkapan supply di BP3MI dalam hal Jenis Pelatihan / Bimbingan Teknis / Sertifikasi yang dilaksanakan untuk Calon Pekerja Migran.

b. Evaluasi Kinerja

Hasil data supply Triwulan III BP3MI Jawa Barat memperoleh angka realisasi sebanyak 432 orang pencari kerja. Angka realisasi Triwulan III menurun dibandingkan data supply Triwulan II yang memperoleh angka realisasi sebanyak 544 orang. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan data supply telah masih kurang dari target Triwulan yang telah ditentukan, yaitu dengan angka 500 orang. Tercapainya target tersebut dikarenakan pada Triwulan III telah dilaksanakan kegiatan Jobfair, sehingga data yang diperoleh berdasarkan sumber data Jobs Info yang terlayani di BP3MI Jawa Barat dan kegiatan Job Fair.

IKU 10 – Calon PMI yang mengikuti Verifikasi Dokumen Penempatan Pemerintah

Tabel 2.17
Capaian Indikator Kinerja Utama 10

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Triwulan III	Capaian
Calon PMI yang mengikuti Verifikasi Dokumen Penempatan Pemerintah	5.000 Orang	0 Orang	0%

a. Informasi Kinerja

Verifikasi Dokumen Pelamar Program G to G adalah proses pemeriksaan atau pengecekan terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pendaftaran Program Kerja G to G. Sedangkan Calon Pekerja Migran Indonesia Penempatan Pemerintah adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang sedang melakukan



proses seleksi Penempatan Program Pemerintah atau G to G yang akan melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Calon Pekerja Migran Indonesia yang mengikuti Verifikasi Dokumen Penempatan Pemerintah adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang sedang dalam proses seleksi Penempatan Program Pemerintah atau G to G dan sedang melaksanakan proses pemeriksaan atau pengecekan terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pendaftaran program tersebut.

b. Evaluasi Kinerja

Verifikasi dokumen pelamar program G to G baru berjalan untuk UBT Khusus G to G Korea sebanyak 252 CPMI pada bulan Februari 2025. Sedangkan untuk sektor fishing G to G Korea telah dilaksanakan pada Triwulan II. Verifikasi dokumen CPMI G to G Korea merupakan pilihan dari CPMI yang akan melakukan perekaman biometrik di wilayah kerja KP2MI. Adapun target tahun ini sebanyak 5.000 CPMI, dan realisasi pada Triwulan III belum terdapat kegiatan Verifikasi Dokumen CPMI G To G Korea.

SASARAN STRATEGIS 8

“MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN KOLABORATIF”

IKU 11 – Pemenuhan Syarat Pengusulan WBK/WBBM

Tabel 2.18
Capaian Indikator Kinerja Utama 11

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Triwulan III	Capaian
Pemenuhan Syarat Pengusulan WBK/WBBM	100%	100%	100%

a. Informasi Kinerja

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang dipimpin dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan.



Indikator ini mengukur nilai pembangunan Zona Integritas satuan kerja (Satker). Satker yang telah membangun Zona Integritas merupakan satker yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, sesuai dengan area perubahan. Predikat WBK/WBBM: Pengakuan atas kinerja Satker dalam mencegah korupsi dan meningkatkan pelayanan publik.

b. Evaluasi Kinerja

Pada tahun 2019 BP3TKI Bandung mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Instansi yang berpredikat wilayah Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Untuk tahun 2020 terdapat perubahan nomenklatur dari BP3TKI Bandung menjadi UPT BP2MI Bandung kemudian menjadi BP3MI Jawa Barat sampai sekarang sedang proses pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM). Nilai Zona Integritas BP3MI Jawa Barat berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi ZI yang sudah dievaluasi TPI pada tahun 2024 sebesar 80,76. Dengan nilai tersebut pada tahun 2025 ini belum bisa diajukan untuk penilaian pembangunan Zona Integritas menuju WBBM oleh MenpanRB, dikarenakan nilai SAKIP dan RB untuk BP2MI masih rendah. Untuk mendukung pembangunan Zona Integritas menuju WBBM perlu menambahkan dan melengkapi beberapa sarana prasarana yang menunjang pelayanan maksimal tetapi masih belum ada anggarannya. Sedangkan untuk pemenuhan Bukti Dokumen ZI masih terus di *update* datanya untuk di *upload* ke *Google Drive*.

IKU 12 – Nilai Pengawasan Kearsipan Internal

Tabel 2.19
Capaian Indikator Kinerja Utama 12

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Triwulan III	Capaian
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	75	91,5	122%

a. Informasi Kinerja

- 1) Hasil penyelenggaraan kearsipan berdasarkan nilai pengawasan kearsipan oleh unit kearsipan BP2MI terhadap BP3MI;



- 2) Pengawasan kearsipan bertujuan untuk menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan;
- 3) Penilaian pengawasan kearsipan terdiri dari 2 aspek yaitu pengelolaan arsip dinamis dan sumber daya kearsipan;
- 4) Kategori penilaian yang ditetapkan oleh ANRI :
 - 0 - 30 : D (Sangat Kurang)
 - >30 - 50 : C (Kurang)
 - >50 - 60 : CC (Cukup)
 - >60 - 70 : B (Baik)
 - >70 - 80 : BB (Sangat Baik)
 - >80 - 90 : A (Memuaskan)
 - >90 - 100 : AA (Sangat Memuaskan)

b. Evaluasi Kinerja

Hasil Pengawasan Kearsipan Internal 2024, BP3MI Jawa Barat memperoleh nilai 91,5. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan arsip di BP3MI Jawa Barat sudah melebihi target yang telah ditentukan yaitu dengan Nilai 75. Nilai ini mengalami peningkatan dari tahun 2023 dengan nilai 61.84.

Adapun peningkatan nilai pengawasan internal ini didukung dengan beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Perbaikan pengelolaan tata naskah dinas di BP3MI Jawa Barat mengikuti kaidah tata naskah dinas yang sudah diatur dalam Peraturan ANRI maupun Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- 2) Perbaikan pengelolaan tata naskah dinas menggunakan system digital/elektronik;
- 3) Pengadaan jabatan fungsional arsiparis dengan skema pindah jabatan dari jabatan pelaksana menjadi jabatan fungsional arsiparis;
- 4) Pengelola arsip BP3MI Jawa Barat mengikuti berbagai macam kegiatan Bimtek tata naskah dinas dan kearsipan.



SASARAN STRATEGIS 9

“MEMBANGUN SISTEM ANGGARAN YANG OPTIMAL”

IKU 13 – Nilai Kinerja Anggaran

Tabel 2.20
Capaian Indikator Kinerja Utama 13

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Triwulan III	Capaian
Nilai Kinerja Anggaran	Baik	Baik	100%

a. Informasi Kinerja

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan salah satu instrumen penganggaran berbasis kinerja sebagai pertanggungjawaban secara profesional kepada stakeholder atas penggunaan anggaran. EKA dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Nilai kinerja anggaran merupakan capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran tingkat satuan kerja pada aplikasi SMART Kementerian Keuangan. Perhitungan nilai capaian kinerja anggaran merupakan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-KL yang terdapat pada SMART Kementerian Keuangan. Adapun nilai kinerja anggaran tingkat satuan kerja merupakan nilai kinerja atas aspek implementasi yang dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara hasil pengukuran setiap variabel aspek implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat satuan kerja yang meliputi:

- Penyerapan anggaran
- Konsistensi anggaran terhadap perencanaan
- Capaian rincian output
- Nilai efisiensi satuan kerja

b. Evaluasi Kinerja

Untuk mengukur capaian kinerja anggaran menggunakan aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Kinerja Terpadu) Kemenkeu yang merupakan aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam memonitoring dan mengevaluasi kinerja anggaran. Berdasarkan aplikasi SMART, realisasi nilai capaian kinerja anggaran Triwulan III yaitu sebesar 47,67. Berikut beberapa analisa belum tercapainya target nilai kinerja anggaran BP3MI Jawa Barat adalah sebagai berikut:



- 1) Terdapat pagu minus yang disebabkan oleh realisasi anggaran untuk mencapai target rincian output melebihi alokasi anggaran yang ada;
- 2) Capaian rincian output sangat rendah dan tidak mencapai target rincian output yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran, maka BP3MI Jawa Barat membuat langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penajaman terhadap target prioritas nasional. Penajaman dilakukan dengan menghitung dengan cermat anggaran yang dibutuhkan untuk layanan penempatan, perlindungan dan pemberdayaan berdasarkan *baseline* data yang dimiliki;
- 2) Koordinasi dengan Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan Umum serta APIP terkait pelaksanaan anggaran serta monitoring dan evaluasi penggunaannya, sehingga jika ditemukan kendala dapat segera diatasi.

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan kegiatan guna pencapaian sasaran tahun 2025, BP3MI Jawa Barat didukung dengan anggaran sebesar Rp. 9.721.224.000,-. Anggaran tersebut bersumber dari Program Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta Program Dukungan Manajemen. Sampai dengan akhir triwulan III telah terealisasi anggaran sebesar Rp. 5.241.361.128,- (53,92%). Untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian sasaran, maka dilakukan perbandingan antara penyerapan anggaran dengan pencapaian kinerja pada setiap sasaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.21
Capaian Anggaran dan Kinerja Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	IKU	Anggaran (Rp)			Kinerja			
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi Triwulan III	%	Rata-rata Capaian s.d. Triwulan III (%)
1	Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Penanganan Permasalahan PMI	Layanan Penanganan Permasalahan dari Jumlah Pengaduan Masuk yang difasilitasi oleh BP3MI	115.260.000	51.401.596	44,60	70%	27,5%	39,29	22,05



No	Sasaran Strategis	IKU	Anggaran (Rp)			Kinerja			
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi Triwulan III	%	Rata-rata Capaian s.d. Triwulan III (%)
2	Mengoptimalkan Sistem Informasi untuk Pelaporan dan Penanganan Permasalahan PMI	Pengaduan yang diproses dan dilayani berbasis SISCO P2MI yang difasilitasi oleh BP3MI	0	0	0	100%	69,76%	69,76	75,42
3	Meningkatkan Penguatan Kerjasama dalam Rangka Penempatan dan Pelindungan PMI	Implementasi Kerjasama	2.400.000.000	262.273.500	11,66	75%	75%	100	100
4	Mewujudkan optimalisasi pemberdayaan untuk Purna PMI dan keluarganya serta rehabilitasi, reintegrasi, dan pelayanan keputungan bagi PMI yang mengalami permasalahan	Jumlah Purna Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan yang difasilitasi Rehabilitasi dan Reintegrasi	94.760.000	28.955.400	30,56	40 Orang	40 Orang	100	100
		Jumlah Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga yang mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial	197.760.000	82.892.014	41,92	40 Orang	20 Orang	50	50
		Jumlah Fasilitas Pelayanan Kepulungan Pekerja Migran Indonesia yang Bermasalah, Sakit, dan Meninggal	472.425.000	231.366.430	48,97	112 Orang	38 Orang	33,93	52,68
5	Meningkatkan Layanan Penempatan PMI Non Pemerintah	Jumlah PMI yang ditempatkan oleh P3MI, UKPS dan Perseorangan yang mendapatkan Layanan Penempatan	2.145.836.000	878.321.885	40,93	27.868 Orang	8.522 Orang	30,58	82,68
6	Meningkatkan pengawasan jaminan sosial	Fasilitasi Klaim Jaminan Sosial oleh CPMI dan PMI yang dilayani oleh BP3MI	35.955.000	20.403.500	56,75	100%	100%	100	100
7	Meningkatkan kapasitas supply	Data supply	39.200.000	18.812.900	47,99	2.000 Orang	432 Orang	21,6	52,55
		Calon PMI yang mengikuti	0	0	0	5.000 Orang	0 Orang	0	131,88



No	Sasaran Strategis	IKU	Anggaran (Rp)			Kinerja			
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi Triwulan III	%	Rata-rata Capaian s.d. Triwulan III (%)
		Verifikasi Dokumen Penempatan Pemerintah							
8	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Kolaboratif	Pemenuhan Syarat Pengusulan WBK/WBBM	3.812.868.000	0	0	100%	100%	100	100
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal		0	0	75	91,5	122	122
9	Membangun Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Kinerja Anggaran		3.541.094.548	92,87	Baik	Baik	100	100

Melihat capaian pada tabel di atas, perlu dilakukan upaya-upaya untuk terwujudnya efisiensi pencapaian Sasaran Strategis secara optimal. Hal ini dapat dicapai melalui komitmen pimpinan terhadap pentingnya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap target kinerja, program dan kegiatan serta penggunaan anggaran pada unit organisasi masing-masing.



BAB III – PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. PERMASALAHAN

Laporan Kinerja BP3MI Jawa Barat Triwulan III menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis BP3MI Jawa Barat Tahun 2025 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Capaian kinerja BP3MI Jawa Barat Triwulan III dapat dinyatakan cukup “Berhasil”, karena realisasi 5 dari 13 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 100% ke atas, dengan rincian :

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 1 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 5 target;
- 3) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 7 target; dan
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Selain itu, secara keseluruhan capaian kinerja BP3MI Jawa Barat Triwulan III mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan seperti memperbanyak kegiatan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, koordinasi dengan stake holder terkait mengenai penanganan pengaduan kasus Pekerja Migran Indonesia, sehingga terwujudnya instansi yang berkepribadian, bersih, kompeten dan berkinerja tinggi untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Pada Tahun 2020 Covid-19 terjadi di Indonesia sekitar dua tahun sehingga negara tujuan penempatan pekerja migran Indonesia banyak yang ditutup dan pada bulan Agustus tahun 2020 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengeluarkan keputusan direktur jenderal pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja nomor 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 tentang penetapan negara tujuan penempatan tertentu bagi pekerja migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru. Keputusan tersebut sebagai dasar penempatan



negara tujuan pekerja migran Indonesia dalam proses penempatan sehingga GTM terjadi penurunan yang drastis dalam penempatan pekerja migran Indonesia. Tahun 2022 proses pelayanan penyiapan pekerja migran di Jawa Barat mulai meningkat khususnya calon pekerja migran terampil dan professional baik dari skema pemerintah, swasta, maupun mandiri.

Tahun 2023 terdapat peralihan sistem penempatan pekerja migran Indonesia dari SISKOTKLN ke SIAPKerja yang selanjutnya terintegrasi dengan SISKOP2MI. Adanya perubahan sistem tersebut membutuhkan penyesuaian khususnya pada skema penempatan P to P. Selain itu, di beberapa jabatan dalam SIP2MI telah habis masa berlakunya dan kurang tersedianya peminat calon pekerja migran Indonesia terhadap jabatan tersebut.

Permasalahan yang terdapat pada kegiatan Pelindungan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Ketidakhadiran pihak P3MI pada saat jadwal klarifikasi & mediasi sehingga menghambat proses penyelesaian aduan;
- 2) Tidak tersedianya informasi progress penanganan yang dilakukan oleh Perwakilan RI di negara penempatan bagi kasus yang sudah dilimpahkan ke pihak eksternal, sebelum diterimanya surat brafax laporan penanganan aduannya;
- 3) Ketidaksediaan dan ketidaksiapan pengadu/keluarga pada proses pendampingan Laporan Polisi terhadap calo perseorangan mulai dari lengkapnya dokumen sebagai barang bukti, pengetahuan atas keseluruhan proses penyiapan penempatan, eksploitasi yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia, ketersediaan saksi lain yang mendukung pernyataan pengadu, dsb;
- 4) Ketidaklengkapan dokumen aduan sehingga minimnya informasi yang dapat dicantumkan dalam surat penanganan aduan, serta pengadu tidak mengetahui pihak-pihak yang memproses penempatan illegal Pekerja Migran Indonesia (calo / pemproses baik yang dikenal langsung maupun lewat media sosial);
- 5) Belum adanya informasi atau aduan yang diterima terkait keberadaan penampungan / proses penempatan nonprosedural Calon Pekerja Migran Indonesia di wilayah Jawa Barat;
- 6) Keinginan Calon Pekerja Migran Indonesia hasil pengamanan untuk tetap berangkat secara nonprocedural setelah diamankan, diedukasi dan dipulangkan ke daerah asal;



- 7) Pemulangan Pekerja Migran Indonesia terlaksana di luar wilayah Jawa Barat sehingga biaya fasilitasi pemulangan relatif lebih besar dari yang telah dianggarkan;
- 8) Informasi rencana kepulangan kerap baru diterima dihari yang sama dengan jadwal kepulangannya, sehingga tidak terdapat cukup waktu untuk mengkoordinasikan fasilitasi pendampingan dengan pemerintah daerah asal di wilayah Jawa Barat;
- 9) Tidak tersedianya dokumen identitas dan kontak keluarga dari Pekerja Migran Indonesia yang akan dituju setelah tiba di Indonesia.

B. SARAN TINDAK LANJUT

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah akan dilakukan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah khususnya Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.

BP3MI Jawa barat telah melaksanakan kegiatan sosialisasi peluang kerja ke luar negeri dan migrasi aman di wilayah Jawa Barat dengan tujuan pemahaman masyarakat Jawa barat terhadap proses penempatan yang procedural ke negara penempatan serta menghindari adanya calo-calo penempatan yang menjanjikan proses penempatan yang cepat namun ilegal. Selain itu, di setiap kantor BP2MI di wilayah Jawa Barat yaitu BP3MI Jawa Barat, P4MI, dan LTSA tersedia layanan jobsinfo untuk para pencari kerja yang ingin bekerja ke luar negari. Tahun 2023 kementerian ketenagakerjaan mengeluarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2023 tentang pencabutan keputusan Menteri ketenagakerjaan nomor 294 Tahun 2020 tentang pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru. Sehingga penempatan negara tujuan terbuka lebar untuk calon pekerja migran yang telah memiliki dokumen lengkap untuk bekerja ke luar negeri.

Tindak lanjut untuk permasalahan yang terdapat pada kegiatan Pelindungan adalah sebagai berikut:



- 1) Penjadwalan ulang kegiatan klarifikasi & mediasi, dukungan pendampingan oleh tim Direktorat Layanan Pengaduan dan Mediasi Advokasi Perseorangan maupun Berbadan Hukum pada saat agenda klarifikasi & mediasi, serta Pelimpahan aduan ke BP2MI pusat;
- 2) Penyampaian surat permohonan perkembangan tindak lanjut penanganan aduan Pekerja Migran Indonesia kepada direktorat pengaduan Kementerian P2MI agar dapat dikoordinasikan kepada Perwakilan RI di negara penempatan;
- 3) Pendalaman kesiapan dan ketersediaan bahan pendampingan Laporan Polisi, tim juga telah menyusun daftar informasi dan bukti yang perlu disiapkan serta dibahas sebelum pelaksanaan LP;
- 4) Penyampaian prosedur penerimaan aduan serta aduan yang dinyatakan valid dan dapat ditindaklanjuti, pengecekan data penempatan pada SISKOP2MI, serta pemberian waktu tambahan bagi pengadu untuk melengkapi dokumen aduan;
- 5) Berkoodinasi dengan satker LTSA dan P4MI BP3MI Jawa Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dan Kab Kota di Jawa Barat, Polda Jawa Barat & Polres di wilayah Jawa Barat, terkait dugaan penempatan ilegal CPMI;
- 6) Edukasi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia hasil pengamanan, serta pendampingan Laporan Polisi untuk melaporkan calo perorangan yang memproses keberangkatan agar bisa dilakukan pengamanan dokumen perjalanan dan tidak disalahgunakan untuk kembali diproses secara ilegal;
- 7) Berkoordinasi dengan BP3MI titik debarkasi (BP3MI Banten & Bali) / transit (BP3MI Jakarta) untuk dapat memfasilitasi penanganan ketibaan dan pemulangan ke daerah asal, serta koordinasi dengan pemerintah daerah terkait kesiapan penerimaan keluarga di daerah asalnya;
- 8) Berkolaborasi antara BP3MI Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal fasilitasi penanganan penjemputan dan pendampingan kepulangan Pekerja Migran Indonesia sakit, terkendala, dan meninggal sampai ke daerah asal;
- 9) Penelusuran kepada stakeholder terkait di pemerintah daerah sampai ke pemerintah desa, bahkan melibatkan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, serta kantor urusan agama.